

**ASPEK KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

TESIS

OLEH

**CHAIRUS SURYATI
NPM. 101803005**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Aspek Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Nama : Chairus Suryati

NPM : 101803005

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. H. Syamsul Arifin., SH., M.H



Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur



Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 09 Mei 2012

Nama : Chairus Suryati

NPM : 101803005



Panitia Penguji Tesis :

Ketua	: Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum
Sekretaris	: Taufik Siregar, SH, M.Hum
Pembimbing I	: Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH
Pembimbing II	: Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum
Penguji Tamu	: Dr. Marlina, SH, M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Chairus Suriyati**

NPM : **101803005**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini dengan judul :

“Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah” adalah benar merupakan hasil penelitian yang saya kerjakan sendiri tanpa meniru atau menjiplak hasil penelitian orang lain, apabila dikemudian hari bahwa tesis ini tidak orisinil/asli dan merupakan hasil plagiat maka saya bersedia di cabut gelar Magister yang saya peroleh.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, terimakasih.

Medan, 20...



(Chairus Suriyati)

ABSTRAK

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sebuah peradaban di sebuah negara. Karena salah satu ciri negara maju adalah bagaimana pendidikan bisa menjadi prioritas dalam sebuah agenda pemerintahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Metode penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis data primer dan didukung data sekunder

Dengan diberlakukannya otonomi daerah sejak 1 Januari 2000, persoalan pendidikan kini menjadi persoalan sentral yang akan sangat berpengaruh bagi kemajuan suatu daerah di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Oleh sebab itu dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang lebih bermutu serta mampu menjawab tantangan masa depan, pemerintah harus memiliki kerangka sistem pendidikan nasional yang akan dijadikan sebagai dasar acuan pelaksanaan kegiatan pendidikan secara menyeluruh di segenap wilayah tanah air Indonesia.

Pemerintah Kota/Daerah khususnya Binjai dalam menentukan kewenangan di dalam merencanakan tujuan kerja daerahnya masing-masing harus melibatkan instansi/dinas terkait. Sehingga antara pemerintahan dengan instansi/dinas ada kerjasama yang baik dalam melaksanakan segala kegiatan atau tugasnya masing-masing. Sehingga apa yang menjadi tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dapat terlaksana.

Kata kunci : kewenangan, pemerintahan daerah, pendidikan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian tesis. Shalawat beriringan juga penulis persembahkan kepada Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad SAW telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Usulan penelitian tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Magister Hukum pada Program Pascasarjana pada Fakultas Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area. Adapun Penelitian tesis ini berjudul **"Aspek Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Dinas Pendidikan Kota Binjai)"**.

Di dalam menyelesaikan usulan penelitian tesis ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada suami ku tercinta Ir. Badlysa yang telah ikut membantu dalam penyelesaian Tesis ini.
2. Anak yang kusayangi Marissa Putri dan M. Rafly.
3. Bapak Prof., Syamsul Arifin, SH.,MH. selaku Komisi Pembimbing I yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian tesis ini.

4. Bapak Dr. Mirza Nasution, SH.,M.Hum. selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area, sekaligus sebagai dosen Pembimbing II Penulisan Tesis ini.
5. Khususnya kepada Prof.,Dr. Zainnudin Mpd. Dan Ibunda Chairul yamiah SE. yang telah memberikan Dukungan moral kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.
6. Kepada adinda Dr. Shanty Juliarti , Yustifadini SH.,MH., dan Ahmad Ade Purnama yang telah memberikan dukungan moral kepada Penulis dalam menyelesaikan Penelitian Tesis ini.
7. Kepada Helda, Fakriyanti, Syafril Pardamean Batubara, Anthony Simamora, Bambang, dan seluruh rekan-rekan seperjuangan di pascasarjana Universitas Medan Area yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian tesis ini.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan, saran dan masukan untuk penyempurnaan penulisan hasil tesis nanti.

Medan, Mei 2012

Penulis

Chairus Suryati

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI	iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Perumusan Masalah.....	7
1.3.Tujuan Penelitian.....	7
1.4.Manfaat Penelitian.....	8
1.5.Kerangka Teori dan Konsepsi	
1.5.1.Kerangka Teori.....	8
1.5.2.Konsepsi	17

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1.Gambaran Umum Kota Binjai.....	19
2.2.Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kota Binjai	22
2.2.1.Program Pendidikan Dinas Kota Binjai	24
2.3.Kewenangan Pemerintah Pusat yang diberikan Kepada Pemerintah daerah	26
2.4.Pengaturan Hukum Kewenangan Pemerintah Kota Binjai dalam Penyelenggaraan Pendidikan.....	42
2.5.Implikasi Penyelenggaraan Pendidikan Kota Binjai	53

BAB III METODE PENELITIAN

3.1.Spesifikasi Penelitian.....	56
3.2.Lokasi Penelitian	57
3.3.Metode Pengumpulan Data	57
3.4.Alat Pengumpulan Data.....	58
3.5.Analisis Data	59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.Hasil Penelitian.....	61
4.1.1.Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan.....	61
4.1.2.Peningkatan Manajemen Pendidikan	68
4.1.3.Pemantauan dan Evaluasi	69
4.2.Pembahasan	71
4.2.1.Hambatan Internal	71
4.2.2.Hambatan Eksternal	77

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.Kesimpulan	80
5.2.Saran	81

DAFTAR PUSTAKA	83
----------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial, ekonomi, politik dan kultural, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan warga bangsa secara keseluruhan. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan usaha untuk mempercepat proses pembangunan. Dalam proses pembangunan tersebut peranan pendidikan amatlah strategis.

Pendidikan sebagai usaha sadar harus terus ditingkatkan. Oleh karenanya pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan yang baik dan berkualitas. Amanat amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun sebuah peradaban di sebuah negara karena salah satu ciri negara maju adalah bagaimana pendidikan dapat menjadi prioritas dalam sebuah agenda pemerintahan. Dalam meningkatkan mutu pendidikan pemerintah mengalokasikan biaya pendidikan 20% dari APBN.¹

Dunia pendidikan tidak hanya mentransformasikan ilmu pengetahuan dari pendidik ke peserta didik tetapi juga memberi semangat kearah yang bersifat spiritual sehingga tercipta generasi yang siap pakai. salah satu tujuan pendidikan nasional adalah membentuk manusia yang utuh, yang pandai dalam bidang ilmu pengetahuan, bermoral peka dan berbudi luhur terhadap orang lain dan beriman.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di kota Binjai Dinas Pendidikan bersama Dewan Pendidikan Kota Binjai kepala sekolah, kepala unit pelaksana teknis tingkat kecamatan, stakeholder, guru dan elemen masyarakat merumuskan draft Peraturan Daerah (Perda) Kota Binjai tentang Penyelenggaraan Pendidikan.²

Menurut UU No.32 Tahun 2004 dalam ketentuan umum disebutkan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu bagian atau onderdil tertentu saja.³

¹ Harian Waspada, *Masalah Pendidikan Kita*, Senin, 14 Februari 2011 hal.B5.

² Harian Waspada, *Disdik Godok Draf Perda Pendidikan*, Selasa, 28 Desember 2010 hal.A4.

³ S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, cetakan 10 Tahun 1994 halaman 78

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdurrahman, 1987, Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah, Media Sarana, Jakarta.

Abdul Halim, 2001, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, UUPAMP YPKN, Yogyakarta.

Ali Masykur Musa, 2009, Politik Anggaran Pendidikan Pasca Perubahan UUD 1945, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Ateng Syafruddin, 1991, Titik Berat Otonomi Daerah pada Dati 11 dan Perkembangannya, Mandar Maju, Bandung.

Bambang Sunggono dan Sri Mamudji, 2009, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Waluto, 1996, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika.

Burki, Shahid Javed, et.al. 1999, *Beyond the Center: Decentralizing the State*, Washington D.C, World Bank.

Dharma Setyawan Salam, 2007, Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya, Jakarta, Djambatan.

D. Riant Nugroho, 2000, Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Ediwarman, 2008, Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Thesis dan Desertasi) Medan.

- Edward B.Fiske dan J.Drost (editor), 1998, Arahana Pembangunan Desentralisasi Pengajaran Politik dan Konsensus, Grasindo, Jakarta.
- Indroharto, 1993, Usaha Memahami Undang-undang Tentang PeradilanTata Usaha Negara Buku 1. Beberapa Pengertian Dasar HukumTata Usaha Negara. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Juli Panglima Saragih,2003, Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Koesoemaatmadja, 1979, Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Binacipta, Bandung.
- Marbun S.F. 2003, Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia, UII-Press, Yogyakarta.
- Muhammad Abdul Kadir, 2004, Hukum Dan Penelitian Hukum, PT.CitraAditya Bakti, Bandung.
- M.Sirozi, 2007, Politik Pendidikan, Dinamika Hubungan Antara Kepentingan Kekuasaan Dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta.
- Ridwan HR,2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, PT.Citra Aditya Bakti.
- Santoso S.Hamijoyo, 1999, Pola Otonomi Daerah yang Efektif dan Efisien untuk Diimplementasikan dalam Bidang Pendidikan, Malang, FIP UNM.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekarwo, 2003, Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah, Airlangga University Press.

S.Prajudi Atmosudirjo, 1994, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan 10.

S.H.Sarundajang, 2001, Arus Bak Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Syaiful Sagala, 2005, Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat Strategi Memenangkan Persaingan Mutu, Nimas Multima, Jakarta.

Tumar Sumihardjo, 2008, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Pengembangan Daya Saing Berbasis Potensi Daerah, Fokusmedia, Bandung.

Umar Juora, Desentralisasi, Demokrasi dan Pemulihan Ekonomi, dalam Jurnal Demokrasi dan HAM, Vol.2, No.2, Juni-September 2002

Wajong J, 1979, Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah, Jakarta, Djambatan.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional
Tahun 2000-2004

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih Dan Bebas Dad Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

C. Surat Kabar

Harian Waspada, Masalah Pendidikan Kita, Senin, 14 Februari 2011 hal.B5.

Harian Waspada, Disdik Godok Draf Perda Pendidikan, Selasa, 28 Desember
2010 hal.A4.

Mandi Ibrahim, Harian Waspada, Pendidikan 2010 Mundur, Selasa, 28 Desember
2010

D. Internet

Musyaffa Rafiqie, Implementasi Kebijakan Pendidikan di Era Otonomi Daerah
(Studi Multi Situs pada Tiga Kabupatendi Kawasan tapal Kuda),
<http://kalya-ilmiah.urn.ac.id/index.phadisettasi/articleAtiew/978>, diakses
pada tanggal 23 April 2009.

Teori Hukum Jaminan, nickreuh.blogspot.com/2009/04/hukum-jaminan-fidusia_06.html-Tembolok-Halaman sejenis, dikutip pada tanggal 17 Juni
2009.

<http://www.unqgulcenter.org/2009/02/09>, Desentralisasi dan Demokrasi Pendidikan di Era Otonomi Daerah, dikutip Senin, 08 Nopember2010 hal,1.

